

A Portrait of Multidimensional Poverty of Indonesian Agricultural Households

Maulini Septya*, Neng Kamarni, & Dodi Devianto

Faculty of Economy and Business, Andalas University, Padang, Indonesia

Abstract

The problem of poverty is not only measured by purchasing power but also by access to fulfillment of needs such as education, health, and quality of life. Poverty measured from this perspective is referred to as multidimensional poverty. This study aims to identify the multidimensional poverty conditions of households in the agricultural sector, which is the sector that contributes the highest monetary poverty rate in Indonesia. The data used is data from the National Socio-Economic Survey (SUSENAS) from 2017 to 2021. This research was conducted on 34 provinces in Indonesia. The portrait of multidimensional poverty is processed using the Alkire-Foster method using three dimensions, namely the dimensions of education, health, and quality of life. The three dimensions are measured using thirteen indicators that have been adjusted to the indicators in SDG'S 2030. The results of this study state that the deprivation of agricultural households is still high in the indicators of years of schooling, ownership of health insurance and availability of proper sanitation. The province with the highest Multidimensional Poverty Index (MPI) value is Papua, followed by four other provinces, namely, East Nusa Tenggara, Banten, West Nusa Tenggara, and West Java. In addition, this study also identifies multidimensional poverty in the agricultural sector by regional classification and gender of the household head.

Keywords: Agriculture Household, Multidimensional Poverty, Alkire Foster Method.

1. Introduction

Proses pembangunan ekonomi suatu wilayah tentu tak luput dari berbagai permasalahan yang terjadi. Salah satu permasalahan yang umum dan selalu dibahas di berbagai negara di belahan dunia adalah terkait masalah kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi agenda di seluruh dunia selama beberapa dekade tanpa dapat sepenuhnya di berantas (Greve, 2019). Sementara itu, meskipun terdapat perbaikan yang signifikan selama lebih dari setengah abad terakhir, permasalahan kemiskinan yang mencolok masih terjadi di banyak negara berkembang (Todaro & Smith, 2022). Penurunan angka kemiskinan telah menjadi fokus utama dalam berbagai upaya pembangunan ekonomi sejak periode tahun 1960-an (Arsyad, 2015). Bahkan saat ini, pemecahan masalah kemiskinan menjadi program pertama dari 17 program Sustainable Development Goal's 2030 (SDG's), yang dicanangkan sebagai rencana aksi global para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, bersama dengan United Nation yang diresmikan oleh PBB pada September 2015 silam. Bunyi program pertama dari SDG's tersebut secara lantang menyebutkan "No Poverty" yang berarti menekankan upaya untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

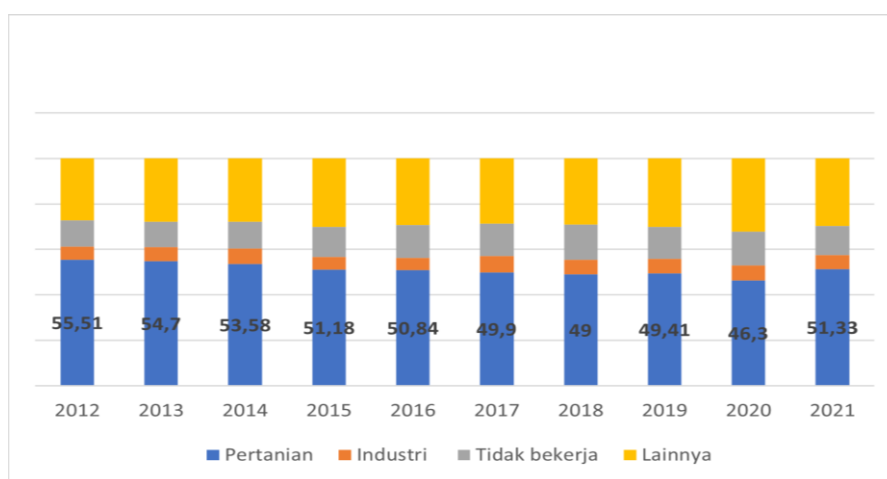
Permasalahan kemiskinan yang masih terus dibahas diantaranya adalah tentang cara pengukurannya. Selama ini, pengukuran kemiskinan didasarkan pada satu dimensi saja, yaitu pendekatan moneter melalui perhitungan pengeluaran. Umumnya kebijakan mengenai kemiskinan hanya mengkaji dimensi ekonomi dengan pertimbangan bahwa dimensi ekonomi yang paling mudah dipelajari dan dianalisis (Fuady et al., 2022). Beberapa peneliti (Sen & Moore, 1982; Alkire & Santos, 2013; Laderchi et al., 2003) telah mendeteksi beberapa kelemahan pengukuran kemiskinan moneter, salah satunya adalah adanya perbedaan pola perilaku konsumsi antar individu, sehingga meskipun sudah melewati garis kemiskinan (pendapatan atau pengeluaran) tertentu tidak menjamin kebutuhan dasar seseorang sudah terpenuhi (Indriani & Setiyono, 2018). Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan yang melibatkan multidimensi diperlukan untuk mengatasi melengkapinya penggunaan pengukuran kemiskinan moneter (Salam et al., 2022).

* Corresponding author.

E-mail address: mauliniseptya91@gmail.com

Pentingnya mengukur kemiskinan secara multidimensi juga diungkapkan oleh Elfindri et al., (2019) dengan alasan bahwa dengan melakukan pengukuran kemiskinan secara multidimensi maka fungsi dalam penyediaan kebutuhan fisik minimum masyarakat oleh pemerintah dapat diketahui. Pengukuran kemiskinan moneter, yang hanya didasarkan pada ketidakmampuan ekonomi semata (konsumsi dan pendapatan), dianggap belum mampu menjelaskan deprivasi yang dialami oleh masyarakat miskin (Artha & Dartanto, 2018). Kondisi ini tercermin dari terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pencatatan kelahiran (Bachtiar et al., 2017).

Sebagai negara agraris, permasalahan kemiskinan yang paling banyak ditemui di Indonesia adalah di sektor pertanian. Pada tahun 2021, lebih dari 27 juta orang di Indonesia hidup berada di bawah garis kemiskinan dan 51,3 persennya merupakan rumah tangga yang berada pada sektor pertanian (BPS, 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga, 2012-2021

Peran pertanian dalam perekonomian nasional sangatlah penting dan strategis. Pertanian merupakan sektor yang perlu difokuskan untuk mengurangi masalah kemiskinan karena penduduk miskin paling banyak berada di sektor pertanian (Kharisma, 2020). Selain itu, sektor pertanian menyediakan lapangan kerja untuk sebagian besar populasi di area pedesaan dan menghasilkan pangan untuk populasi tersebut (Rusliyadi et al., 2018). Tercatat pada tahun 2021, jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian ternyata menempati urutan teratas dibandingkan 16 sektor lainnya yaitu sebesar 28,3%. Oleh karena itu akan tampak logis bahwa pertumbuhan ekonomi sektor pertanian lebih penting dalam mengurangi kemiskinan daripada pertumbuhan sektor lainnya (Christiaensen & Martin, 2018). Begitu juga yang disampaikan oleh Sheng-gen dan Cho (Sheng-gen & Cho, 2021), bahwa pertumbuhan ekonomi sektor pertanian secara khusus merupakan jalur penting dalam mengurangi kemiskinan.

2. Literature Review

Pengertian kemiskinan, sudah seyogyanya tidak hanya selalu dipandang dari dimensi ekonomi semata, tetapi juga dapat dikaitkan dari sisi sosial maupun budaya masyarakat. Kemiskinan multidimensi menggambarkan deprivasi (kekurangan) akan kemampuan dalam memenuhi hak-hak dasar yang seyogyanya diperoleh setiap individu. Seseorang dikatakan miskin jika mengalami *capability deprivation* yaitu, kekurangan akan kebebasan yang substantif (Sen, 2000). Lebih lanjut Amartya Sen menjelaskan bahwa pengukuran kemiskinan dengan pendekatan kemampuan lebih terkonsentrasi pada deprivasi yang penting secara intrinsik (tidak seperti pendapatan rendah, yang hanya signifikan secara instrumental).

Kemiskinan sulit diartikan dalam definisi yang bersifat tunggal karena merupakan suatu kondisi yang bersifat multidimensi dan kompleks (Aprianto, 2017)(Indrawati et al., 2019)(Jacobus et al., 2019)(Thohari et al., 2022). Asselin (2009) menjelaskan kemiskinan sebagai bentuk ketidakadilan dalam hal kemampuan individu, rumah tangga, dan komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berhubungan dengan dimensi pendapatan, pekerjaan, makanan/nutrisi, kesehatan, pendidikan, air bersih yang layak, sanitasi yang memadai, perumahan/ lingkungan tempat

tinggal, akses terhadap pasar dan aset yang produktif, serta partisipasi dalam masyarakat (Sumargo et al., 2019b).

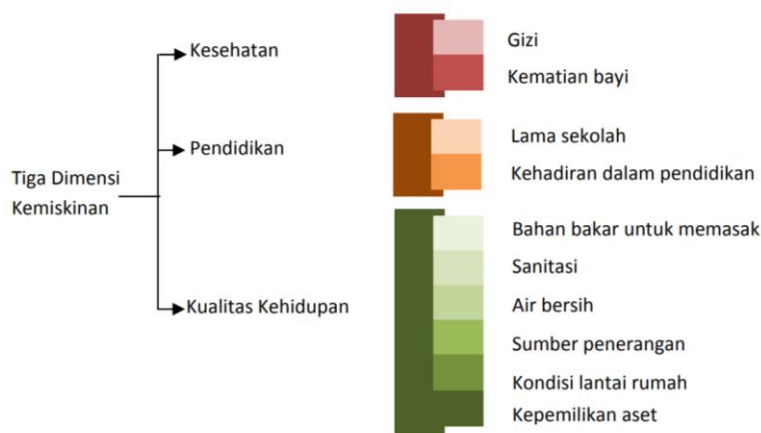
Pemahaman tentang kemiskinan secara multidimensi ini telah digaungkan oleh World Bank selama dekade terakhir, dan baru-baru ini konsep tersebut mulai diterapkan oleh pengambil kebijakan di Indonesia. United Nations Development Programme (UNDP) dan OPHI telah memelopori penyusunan penghitungan *Multidimensional Poverty Index* (MPI) menggunakan dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indikator dalam tiap dimensi tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan berbagai kondisi sehingga bisa berbeda antarnegara, tetapi tetap berada dalam koridor tiga dimensi tersebut (Alkire & Foster, 2011).

Bergerak dari perdebatan pengukuran kemiskinan tersebut, Alkire dan Foster pada tahun 2010 telah berhasil merumuskan suatu metode penghitungan kemiskinan baru yang kemudian dinamakan dengan Indeks Kemiskinan Multidimensi (*Multidimensional Poverty Index*). Di tahun yang sama, Alkire dan Santos pertama kalinya, di bawah naungan UNDP (*United Nations Development Program*) and OPHI (the Oxford Poverty and *Human Development Initiative*) melakukan penghitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi ini terhadap 104 negara. Data yang digunakan adalah data mikro dari survei rumah tangga yang jumlah sampelnya telah mewakili 78% dari populasi dunia dan membentuk 10 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi yang sama dengan dimensi Indeks Pembangunan Manusia (*Humand Develpoment Index* yaitu, dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indeks ini secara internasional telah dipublikasikan dalam *Human Development Report (HDR) 2010* (Budiantoro et al., 2013). Penghitungan indeks kemiskinan multidimensi secara resmi pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 2013 oleh Budiantoro et al. Dalam publikasi tersebut, dihasilkan Indeks Kemiskinan Multidimensi hingga tingkat kabupaten kota di 33 provinsi di Indonesia. Berbagai studi empiris lain juga telah melakukan penghitungan indeks kemiskinan multidimensi ini, salah satunya adalah penelitian (Artha & Dartanto, 2018). Dari hasil penelitian tersebut, selain mengukur kemiskinan secara multidimensi, juga diketahui faktor-faktor demografi yang berpengaruh terhadap kemiskinan multidimensi.

Adapun beberapa kegunaan penghitungan MPI adalah sebagai berikut (Prakarsa, 2015):

- Menambah dan membandingkan alat ukur kemiskinan yang sudah digunakan dalam pembuatan kebijakan.
- memonitoring komposisi dan tingkat kemiskinan serta pergerakan angka kemiskinan dari waktu ke waktu.
- Sebagai bahan dalam kegiatan evaluasi program pengentasan kemiskinan
- Memetakan kondisi yang sebenarnya dari segala aspek (multidimensi) seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
- Mengidentifikasi perangkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
- Membandingkan kondisi kemiskinan dari beragam aspek seperti wilayah, etnis, jenis kelamin, rumah tangga, dan lain sebagainya.

Pengukuran MPI yang ditetapkan oleh OPHI dan UNDP dengan metode Alkire Foster menggunakan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Sementara itu, untuk pengukuran tiap dimensi menggunakan sepuluh indikator seperti yang dijabarkan pada gambar di bawah ini:



Sumber: OPHI dan UNDP, 2010

Gambar 2. Dimensi dan Indikator MPI emnurut OPHI dan UNDP

Pada prakteknya, UNDP dan OPHI memberikan keleluasaan pemakaian indikator sesuai dengan karakter yang terjadi di masing-masing negara. Bila ada indikator yang telah ditetapkan oleh UNDP dan OPHI tidak terdapat dalam sistem pendataan di suatu negara maka bisa dilakukan proksi (pendekatan) terhadap indikator tersebut yang tetap memenuhi standar yang tertuang dalam komponen SDGs.

Adanya keleluasaan penggunaan indikator dalam MPI selama tidak berbeda dari konteks MPI dan SDGs menjadikan implementasi pengukuran MPI pada penelitian ini sedikit berbeda. Secara dimensi, penelitian ini tetap menggunakan tiga dimensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun untuk indikator yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan data pada survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Berikut adalah penjelasan mengenai dimensi dan indikator MPI yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan dalam penelitian ini terdiri dari indikator kepemilikan jaminan kesehatan dan masalah kesehatan. Untuk indikator kepemilikan jaminan kesehatan, rumah tangga dianggap terdeprivasi dalam hal asuransi kesehatan ketika semua anggota rumah tangga tidak memiliki perlindungan asuransi kesehatan, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta (Aulia et al., 2019). Sementara itu, pada indikator masalah kesehatan rumah tangga dianggap terdeprivasi jika semua anggota rumah tangga mengalami sakit (Amalia & Kadir, 2016).

b. Dimensi Pendidikan

Risiko menjadi miskin dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pendidikan adalah indikator penting yang mempengaruhi kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, dengan bayaran yang layak, tetapi juga terkait dengan konsep individu mengenai standar hidup dan layanan kesehatan yang lebih baik serta tidak merasa terisolasi (Bici & Çela, 2017). Dimensi kesehatan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator partisipasi sekolah, melek huruf, dan lama sekolah. Untuk indikator partisipasi sekolah, terdapat anggota rumah tangga usia sekolah (7-18 tahun) tetapi tidak bersekolah (Haris, 2016). Sementara itu, pada indikator melek huruf rumah tangga dianggap terdeprivasi jika ada anggota rumah tangga yang berada pada usia 15 tahun atau lebih, setidaknya satu orang, yang tidak bisa membaca dan menulis (Rastantra, 2021). Dan terakhir pada indikator lama sekolah, rumah tangga yang terdeprivasi adalah ketika tidak ada anggota rumah tangga yang berusia 25 tahun atau lebih yang telah menyelesaikan sembilan tahun bersekolah (Huda, 2020).

c. Dimensi Standar Hidup

Dalam pengukuran dimensi standar hidup, penelitian ini menggunakan delapan indikator yaitu: akses terhadap air bersih, sanitasi, sumber penerangan, kondisi lantai rumah, kondisi dinding rumah, kondisi atap rumah, bahan bakar untuk memasak, dan kepemilikan aset. Pemakaian indikator ini berdasarkan kepada literatur MDGs dan disesuaikan dengan ketersediaan data yang dimiliki. Penjelasan mengenai deprivasi yang dialami rumah tangga berdasarkan indikator adalah sebagai berikut:

- (1) Sumber Penerangan : rumah tangga tidak dialiri listrik (Sumargo et al., 2019).
- (2) Bahan Bakar Memasak: rumah tangga menggunakan bahan bakar memasak dari kayu bakar/ briket/ arang (Indriani & Setiyono, 2018).
- (3) Sanitasi: rumah tangga tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar (Gopal et al., 2021).
- (4) Air Minum yang Layak: rumah tangga mengkonsumsi air minum yang tidak layak.
- (5) Kondisi Atap Rumah: rumah tangga menempati rumah yang Sebagian besar atapnya berupa rumbia (Muthia & Barikha, 2022).
- (6) Kondisi Lantai Rumah: rumah tangga menempati rumah yang Sebagian besar lantainya berupa dari tanah (Muthia & Barikha, 2022).
- (7) Kondisi Dinding Rumah: rumah tangga menempati rumah yang sebagian besar dindingnya berupa kayu (Muthia & Barikha, 2022).
- (8) Kepemilikan Aset: rumah tangga adalah jika tidak memiliki kendaraan (mobil, perahu, sepeda, sepeda motor) dan tidak memiliki lebih dari satu dari perangkat berikut: televisi, pendingin udara, pemanas, atau lemari es (Jacobus et al., 2018).

3. Research Method

Metode yang digunakan dalam pengukuran kemiskinan secara multidimensi dinamakan dengan metode Alkire-Foster. Adapun tahapan metode ini adalah sebagai berikut (Alkire & Santos, 2013):

- a. Menentukan unit analisis. Unit analisis penelitian ini adalah rumah tangga sektor pertanian.

- b. Menentukan seperangkat indikator yang akan dipertimbangkan dalam ukuran multidimensi. Data untuk semua indikator harus tersedia untuk orang atau rumah tangga yang sama. Penelitian ini nantinya terdiri dari tiga belas indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi, yaitu dimensi Pendidikan, Kesehatan, dan kualitas hidup.
- c. Menetapkan titik potong (*cut offs*) deprivasi untuk setiap indikator, yaitu tingkat pencapaian (normatif) yang dianggap cukup agar tidak terdeprivasi pada setiap indikator.
- d. Menerapkan titik potong untuk mengidentifikasi setiap orang terdeprivasi atau tidak di setiap indikator.
- e. Menetapkan bobot atau penimbang yang dimiliki setiap indikator, sehingga jumlahnya menjadi satu. Dalam penelitian ini akan digunakan bobot yang sama (*equal*) untuk setiap indikator. Penelitian ini menggunakan tiga dimensi, maka bobot masing-masing penimbang di tiap dimensi bernilai 0,33. Untuk mendapatkan bobot tiap indikator, maka bobot penimbang tiap dimensi dibagi sebanyak jumlah indikator dimensi tersebut. Rangkuman dimensi dan indikator beserta bobot yang digunakan pada penelitian ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Dimensi dan Indikator, MPI

Dimensi (1)	Bobot Dimensi (2)	Indikator (3)	Bobot Indikator (4)
Kesehatan	1/3	Kepemilikan jaminan kesehatan	1/6
		Masalah kesehatan	1/6
		Melek huruf	1/9
Pendidikan	1/3	Partisipasi sekolah	1/9
		Lama sekolah	1/9
		Jenis atap	1/24
		Jenis dinding	1/24
		Jenis lantai	1/24
Standar Hidup	1/3	Sanitasi	1/24
		Air minum layak	1/24
		Bahan bakar memasak	1/24
		Sumber penerangan	1/24
		Kepemilikan Aset	1/24

Sumber : Diolah penulis, 2023

- f. Menetapkan garis kemiskinan, yaitu proporsi deprivasi tertimbang yang dimiliki rumah tangga agar dianggap miskin secara multidimensi. Pada penelitian ini, rumah tangga dikatakan miskin multidimensi jika penjumlahan bobot penimbang yang diperoleh lebih besar dari 0,33.
- g. Membuat proporsi deprivasi tertimbang untuk setiap orang, yang dapat disebut skor deprivasi ($c_i(k)$), dan mengidentifikasi seseorang dikatakan miskin atau tidak berdasarkan garis kemiskinan yang sudah ditentukan tersebut.
- h. Menghitung proporsi penduduk yang teridentifikasi miskin multidimensi di populasi. Ini adalah *multidimensional porverty headcount/ Headcount Ratio* (H), juga disebut kejadian kemiskinan multidimensi. Penghitungan yang digunakan adalah:

$$H = \frac{q}{n} \quad (1)$$

dengan q adalah jumlah penduduk miskin multidimensi, dan n adalah total penduduk.

- i. Menghitung persentase rata-rata indikator tertimbang di mana orang miskin terdeprivasi. Ini menjumlahkan skor deprivasi orang miskin dan membaginya dengan jumlah total orang miskin. Inilah yang disebut dengan intensitas kemiskinan multidimensi, dilambangkan dengan A.

$$A = \frac{\sum_{i=1}^q c_i(k)}{q} \quad (2)$$

dengan $c_i(k)$ dinyatakan sebagai skor deprivasi penduduk yang tergolong miskin multidimensi; dan

Langkah selanjutnya adalah menghitung Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang dilambangkan dengan M_0 sebagai produk dari dua indeks sebelumnya: $M_0=H \times A$. Analoginya, M_0 dapat diperoleh sebagai jumlah dari deprivasi tertimbang yang dialami oleh orang miskin (hanya yang miskin), dibagi dengan total populasi.

4. Results and Discussions

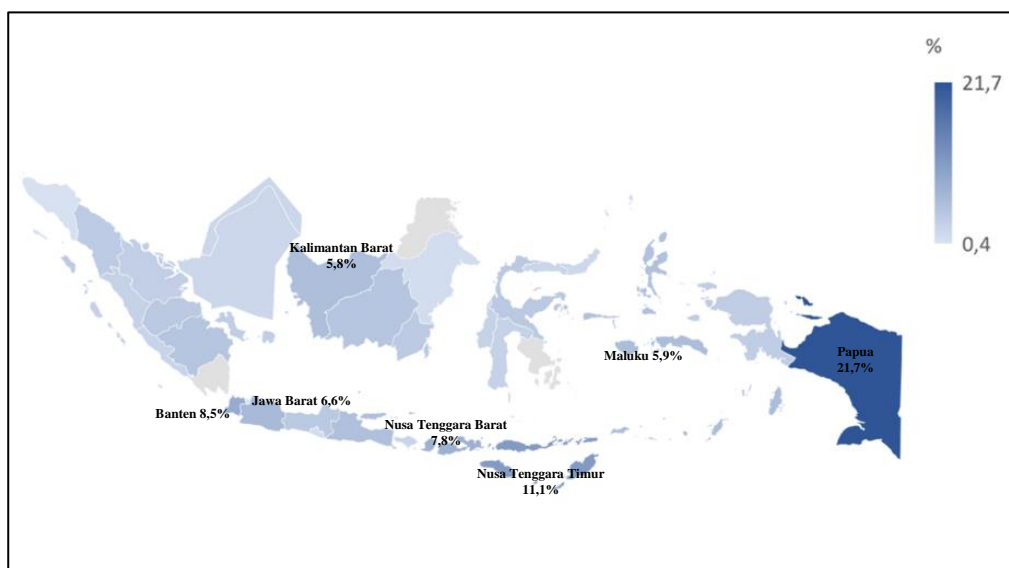
Studi terkait kemiskinan memiliki beragam istilah yang digunakan. Istilah kemiskinan (*poverty*) dan mengalami kemiskinan (*being poor*) menjadi istilah yang umumnya digunakan dalam berbagai literatur kemiskinan. Namun, seiring perkembangan zaman, penggunaan kata deprivasi kemudian menjadi populer digunakan untuk menggambarkan kondisi kekurangan (*lacking*) dan membutuhkan (*needing*) (Finley, 2003). Dalam pembahasan selanjutnya, kata deprivasi (kekurangan) digunakan untuk menggambarkan kondisi ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi kemampuan dasar yang diwakilkan oleh tiga belas indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Rumah tangga dikatakan mengalami deprivasi apabila tidak mampu memenuhi kondisi tertentu pada setiap indikator dan selanjutnya dikatakan mengalami kemiskinan multidimensi jika mengalami deprivasi minimal pada satu dimensi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kemiskinan secara multidimensi dapat memberikan informasi bahwa rumah tangga mengalami deprivasi atau kemiskinan minimal pada satu dimensi.

Tabel 2. Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Deprivasi Menurut Indikator, Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Melek Huruf	7,4	10,1	10,2	10,1	8,7
Partisipasi Sekolah	1,6	1,9	1,8	1,6	1,4
Lama Sekolah	65,6	73,7	72,4	66,5	66,7
Kepemilikan BPJS	34,0	32,2	31,8	27,2	29,1
Keluhan Kesehatan	3,9	4,6	5,4	4,8	5,0
Kondisi Atap	10,1	7,9	8,0	7,0	6,9
Kondisi Dinding	7,8	9,0	7,9	6,9	6,8
Kondisi lantai	8,5	10,7	9,7	8,9	8,7
Sanitasi	32,5	36,5	38,6	35,4	33,4
Air Minum Layak	22,1	26,1	25,7	25,7	24,6
Kepemilikan Listrik	10,2	14,0	12,4	11,5	10,4
Bahan Bakar Memasak	24,6	34,1	30,5	27,2	23,6
Kepemilikan Aset	21,7	25,0	24,1	22,5	21,4

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa lebih dari 50% rumah tangga pertanian masih terdeprivasi pada indikator lama sekolah. Sementara itu, pada indikator kepemilikan BPJS, sanitasi layak, bahan bakar memasak, dan kepemilikan aset, persentase rumah tangga yang terdeprivasi masih tinggi dan perlu perbaikan yang lebih serius. Di lain sisi, rumah tangga yang terdeprivasi pada indikator partisipasi sekolah, kondisi atap, kondisi dinding, kondisi lantai, dan keluhan kesehatan hanya berkisar di bawah 10 persen. Selain itu, terlihat juga bahwa dari tahun ke tahun terjadi penurunan persentase rumah tangga yang terdeprivasi pada hamper seluruh indikator. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya pembangunan sehingga hak-hak dasar masyarakat semakin mudah terpenuhi.

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) menyatakan kedalaman dan ketinggian angka kemiskinan, secara bersama-sama, pada suatu wilayah. Artinya, nilai indeks kemiskinan yang tinggi menggambarkan semakin tinggi dan semakin dalam tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah. Begitupun sebaliknya, nilai indeks kemiskinan multidimensi yang rendah menggambarkan semakin rendah dan semakin dangkal tingkat kemiskinan yang dialami suatu wilayah tertentu.



Sumber: Diolah Penulis, 2024

Gambar 3. Peta Persebaran Indeks Kemiskinan Multidimensi Sektor Pertanian di Indonesia, Tahun 2021

Gambar 3 memperlihatkan sebaran nilai Indeks Kemiskinan Multidimensi di Indonesia tahun 2021. Provinsi Papua memiliki nilai Indeks Kemiskinan Multidimensi paling tinggi, artinya persentase kemiskinannya paling tinggi dan kedalaman kemiskinannya paling dalam di antara provinsi lainnya. Di ikuti oleh provinsi Nusa Tenggara Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Maluku, dan Kalimantan Barat. Di sisi lain, nilai Indeks Kemiskinan Multidimensi di provinsi Aceh dan DKI Jakarta tidak sampai menyentuk angka 1%.

Kondisi kemiskinan multidimensi di sektor pertanian dapat dipetakan menurut klasifikasi wilayah. Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa persentase rumah tangga sektor pertanian yang mengalami kemiskinan multidimensi di wilayah pedesaan jauh nilainya di atas persentase rumah tangga sektor pertanian di wilayah perkotaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indriani & Setiyono, 2018).

Tabel 3. Persentase Rumah Tangga Miskin Multidimensi Sektor Pertanian Menurut Klasifikasi Wilayah, Tahun 2017-2021

Klasifikasi Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Perkotaan	22,0	14,8	14,8	13,8	20,3
Perdesaan	78,0	85,2	85,2	86,2	79,7

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Kepala rumah tangga merupakan orang yang berperan penting dalam terselenggaranya kehidupan rumah tangga. Kepala rumah tangga menjadi tumpuan utama dalam kegiatan ekonomi suatu rumah tangga. Dalam konsep yang digunakan BPS, kepala rumah tangga merupakan orang yang memiliki penghasilan terbesar dalam rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan di rumah tangganya.

Tabel 4. Persentase Rumah Tangga Miskin Multidimensi Sektor Pertanian Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Tahun 2017-2021

Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020	2021
Laki-laki	83,2	83,1	82,3	80,6	81,6
Perempuan	16,8	16,9	17,7	19,4	18,4

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4, persentase kepala rumah tangga miskin multidimensi yang berjenis kelamin laki- laki cenderung lebih tinggi dibandingkan persentase kepala rumah tangga dengan jenis kelamin perempuan dari tahun ke tahun.

5. Conclusion

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan multidimensi sektor pertanian di Indonesia. Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, tingkat deprivasi rumah tangga di sektor pertanian diketahui masih tinggi. Paling banyak rumah tangga mengalami deprivasi pada indikator lama sekolah, kepemilikan BPJS, dan ketersediaan sanitasi yang memadai. Deprivasi dialami pada mayoritas rumah tangga di wilayah pedesaan. Kemiskinan multidimensi juga dialami oleh mayoritas rumah tangga dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih baik lagi dalam pengentasan kemiskinan di sektor pertanian dan pemerintah daerah maupun pusat lebih dituntut untuk memberikan perhatian terhadap provinsi di Indonesia yang tingkat kemiskinan multidimensinya sektor pertaniannya masih sangat tinggi.

References

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2013). *OPHI WORKING PAPER N O . 59 Measuring Acute Poverty in the Developing World : Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index*.
- Amalia, R. R., & Kadir. (2016). *Multidimensional Poverty Index (MPI) in Agricultural Household in Indonesia*.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169–188.
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. UPP STIM YKPN.
- Artha, D. R. P., & Dartanto, T. (2018). The multidimensional approach to poverty measurement in Indonesia: Measurements, determinants and its policy implications. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 39(3), 1–38.
- Aulia, L. A., Wulansari, I. Y., & Stis, P. S. (2019). *Pembentukan Indeks Kemiskinan Multidimensi Anak dan Pemanfaatannya untuk Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan di Indonesia Tahun 2017 (The Construction of Child Multidimensional Poverty Index and Its Utilization for Sustainable Poverty Alleviation in Indonesia in 2017)*.
- Bachtiar, N., Rasbi, M. J., & Fahmi, R. (2017). Analisis Kemiskinan Anak Balita Pada Rumah Tangga Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 29. <https://doi.org/10.14203/jki.v11i1.66>
- Bici, R., & Çela, M. (2017). Education as An Important Dimension of the Poverty. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(3), 88. <https://doi.org/10.26417/ejms.v4i3.p88-95>
- BPS. (2021). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Budiantoro, S., Fanggidae, V., Saputra, W., Maftuchan, A., & Artha, D. R. P. (2013). *Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Prakarsa.
- Christiaensen, L., & Martin, W. (2018). Agriculture, structural transformation and poverty reduction: Eight new insights. *World Development*, 109, 413–416. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.027>
- Elfindri, E, Hendro., & Zamzami. (2019). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Rajawali Pers.
- Finley, A. P. (2003). Are They The Poorest of The Poor? Examining Capital Accumulation Among Female-Headed Household in Mexico. *Proquest, UMI Number: 3097527. United State*.
- Fuady, M., Fuady, M. R. F., & Aulia, F. (2022). Kemiskinan Multi Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Tataloka*, 24(4), 330–337. <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.4.330-337>
- Gopal, P. S., Abdul Rahman, M. A., Malek, N. M., Jamir Singh, P. S., & Chee Hong, L. (2021). Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(1), 40–51. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i1.608>
- Greve, B. (2019). Routledge international handbook of poverty. In *Routledge International Handbook of Poverty*. <https://doi.org/10.4324/9780429058103>

- Haris, M. (2016). Penghitungan Kemiskinan Multidimensi. *Jurnal Paradigma*, 5(3).
- Huda, D. A. N. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Multidimensional di Negara Berkembang dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik (Vol. 20, Issue 2).
- Indrawati, I., Ermawati, E., & Istiqamah, R. (2019). Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderating di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. 1(2).
- Indriani, L., & Setiyono. (2018). Multidimensional Poverty Analysis in Jawa Tengah Province, 2011-2013. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, V(13), 2011–2013.
- Indriani, L., & Setiyono. (2018). Analisis Kemiskinan Multidimensi di Provinsi Jawa Tengah 2011-2013. *Jurnal Aplikasi Statistika Dan Komputasi*, V, 13–24.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 19, Issue 3).
- Kharisma, B. (2020). Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Pproduksi dan Kemiskinan Pedesaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, September, 211. <https://doi.org/10.24843/jekt.2020.v13.i02.p01>
- Laderchi, C. R., Saith, R., & Stewart, F. (2003). Does it Matter that we do not Agree on the Definition of Poverty ? A Comparison of Four Approaches (Vol. 31, Issue 3). <https://doi.org/10.1080/1360081032000111698>
- Muthia, A., & Barikha, A. L. (2022). Deprivation of Multidimensional Poverty in Pekalongan City. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 5(2), 143–154. <https://doi.org/10.15294/efficient.v5i2.53153>
- Prakarsa. (2015). Multidimensional Poverty Index Indonesia 2012-2014. *Ford Foundation*.
- Rastantra, V. A. (2021). Analisis Multilevel Kemiskinan Rumah Tangga Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Vol. 14, Issue 2). www.unipasby.ac.id
- Rusliyadi, M., Bin Hj Mohd Jamil, A., Maselena, A., & Tri Kumalasari, R. (2018). Agricultural extension policy, agricultural growth and poverty reduction in Indonesia. *Researchgate.Net*, 7(4), 5539–5550. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.13337>
- Salam, A., Pratomo, D. S., & Saputra, P. M. A. (2022). Analisis kemiskinan pada rumah tangga di Jawa Timur melalui pendekatan multidimensi dan moneter. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 127. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.480>
- Sen, A. (2000). *Development As Freedom*. Oxford University Press.
- Sen, A., & Moore, M. (1982). Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation. In *Pacific Affairs* (Vol. 55, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/2757163>
- Sheng-gen, F., & Cho, E. E. Y. (2021). Paths out of poverty: International experience. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 857–867. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63295-6](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63295-6)
- Sumargo, B., Miduk, N., & Simanjuntak, M. (2019a). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia Main Deprivation of Multidimensional Poverty among Provinces in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160–172.
- Sumargo, B., Miduk, N., & Simanjuntak, M. (2019b). Main Deprivation of Multidimensional Poverty among Provinces in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160–172.
- Thohari, A. M., Islam, U., Raden, N., & Said, M. (2022). Islam dan Tantangan Kemiskinan di Indonesia: Telaah Pemikiran Ali Ashgar Engineer. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3(2).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2022). *Economic Development 13th edition*. Pearson Education. Inc.